



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716

Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id/> - Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

ALASAN TERHADAP PERUBAHAN BEBERAPA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Pada Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2026 pada Pukul 09:00 WIB bertempat di Ruang Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan expose oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Dari paparan oleh pihak evaluator tersebut terdapat beberapa indikator Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025.

Adapun perbedaan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sub Kegiatan	yang digunakan OPD	yang diatur oleh Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Penanggung Jawab
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Ekbang SDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Ekbang SDA
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PBJ
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Umum
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Umum
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Organisasi
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		

Sub Kegiatan	yang digunakan OPD	yang diatur oleh Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Penanggung Jawab
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi
	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Organisasi
	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB		
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Prokopim
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Prokopim
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Prokopim

Sumber: Data Expose Inkab 2026

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 bahwa salah satu yang menjadi catatan Kemenpan RB adalah Perjenjangan Kinerja/ Cascading yang disusun beberpa PD belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021, yaitu belum mempertimbangkan *Logical framework* dan *Critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga perjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi dan isu strategis.

Menindaklanjuti hal tersebut maka dalam menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja mengacu pada pohon kinerja/ cascading yang disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 yang berorientasi outcome dengan indicator kinerja yang SMART (specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Time-bound).

Atas dasar ini kami menyusun sasaran kinerja dari level Kepala PD, pejabat struktural sampai dengan sasaran kinerja level input atau staf pelaksana yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Demikian tanggapan ini dibuat untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak yang memerlukan.

Putussibau, 11 Mei 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Ambrosius Sadau

LAMPIRAN I
Foto Kegiatan Expose AKIP 2025 Setda oleh Inkab

